



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR KEP.22/M.PPN/HK/02/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

**TAHUN 2020**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. bahwa Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun untuk rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang diindikasikan membutuhkan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negeri;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA TAHUN 2020.**
- PERTAMA : Menetapkan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Februari 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

ttd.

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN**

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS**

**NOMOR KEP.22/M.PPN/HK/02/2020**

**TANGGAL 28 FEBRUARI 2020**

**DAFTAR RENCANA**

**KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

**TAHUN 2020**

**PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KATEGORI SIAP DITAWARKAN**

1. Pelabuhan Patimban, Jawa Barat;
2. *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi;
3. Jalan Tol Semanan-Balaraja;
4. Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg;
5. Jalan Tol Akses Patimban;
6. Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap;
7. Jalan Tol Bogor-Serpong (via Parung);
8. Jalan Tol Layang Dalam Kota Ruas Cikunir-Karawaci ;
9. Jalan Tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami;
10. Sistem Transaksi Jalan Tol *Multi Lane Free Flow* (MLFF);
11. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Sarbagikung (Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung), Bali.

**PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KATEGORI DALAM PROSES PENYIAPAN**

1. Pembangunan Bandar Udara Singkawang, Kalimantan Barat;
2. Pengembangan Pelabuhan Baubau, Sulawesi Tenggara;
3. Pengembangan Pelabuhan Anggrek, Gorontalo;
4. LRT Kota Semarang;
5. Pengembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Pulau Jawa dan Sumatera;
6. Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau;
7. Jalan Tol Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar);

8. Pembangunan ...

8. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung;
9. Duplikasi dan/atau penggantian jembatan Callender Hamilton (CH) di lintas utama pulau Jawa;
10. Pembangunan Bendungan Merangin, Jambi;
11. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kamijoro, DI Yogyakarta;
12. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatigede, Jawa Barat;
13. Pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tangerang Selatan;
14. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka Jawa Barat;
15. Pengelolaan Sampah Energi Listrik (PSEL) TPA Sarbagita Suwung di Bali.
16. Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Jatibarang di Kota Semarang;
17. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan, DI Yogyakarta;
18. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Modern;
19. Penyediaan Infrastruktur Panel Utilitas Terpadu di Wilayah Kuta, Badung;
20. Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta;
21. Kawasan Industri Teluk Bintuni;
22. Pembangunan Kawasan Riset Kelautan Nasional;
23. Pengembangan Jogja Agro Park Daerah Istimewa Yogyakarta;
24. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A Provinsi Kalimantan Tengah;
25. Pembangunan Lembaga Masyarakat Industri di Nusakambangan;
26. Pemandahan Lembaga Masyarakat dari Pusat Kota ke Pinggiran;
27. Perumahan Cisaranten Bina Harapan, Bandung;
28. Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik Secara Terpadu di Wilayah Sumatera dan Sumapapua (Sulawesi, Maluku, Papua).

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati